

BAB I

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, BKKBN diberi mandat untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan”, Agenda Prioritas ke-5 “ Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, serta Agenda Prioritas ke-8 “Revolusi Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Amanat Presiden RI kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB merupakan satu diantara kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya

dapat secara langsung diterima masyarakat. Untuk itu segera dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan di laksanakan di Kampung KB. Program Kampung KB tidak lagi hanya fokus pada upaya pengendalian jumlah penduduk, namun juga bagaimana melalui Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu, KB dipandang masih dibutuhkan untuk memenangkan persaingan global.

Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota. Kampung KB dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas serta masyarakat yang sejahtera.

Pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan mengingat meningkatnya kesejahteraan merupakan tujuan akhir pelaksanaan pembangunan ekonomi. Selain itu kesejahteraan juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Maka dari itu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah setiap negara. Kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu bagian dari tujuan terbentuknya Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang — Undang Dasar 1945.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Salah satu bentuk kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi salah satu faktor pendorong kemiskinan adalah dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat. Penerapan KB dalam masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan jumlah anak sehingga seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.

Pelaksanaan program KB yang dimulai pada tahun 1970-an bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Upaya pemerintah untuk menyukseskan

program KB dengan mengalokasikan anggaran yang terus meningkat setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tingkat daerah. Namun beberapa dekade terakhir program KB mulai meredup dan tidak terdengar gaungnya.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penulis dalam penelitian ini adalah: penulis Nosa Arighi Bachtiyar dengan judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kampung KB di Dusun Ambeng-ambeng Desa Ngingas kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan hasil penelitian Implementasi program kampung kb di Dusun Ambeng-ambeng telah berjalan dengan baik. Hanya saja ada satu kegiatan yang belum terlaksana, yakni Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja. Selanjutnya Elsa Setiawati “Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Pantolan Boya Kecamatan Tawaeli” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap/tanggapan masyarakat terhadap program kampung KB di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli., dengan hasil penelitian bahwa persepsi masyarakat terhadap program kampung KB di kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli hasilnya adalah sangat baik atau sangat setuju dengan adanya program Kampung KB. Hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat yang mana melalui sikap/tanggapan, tindakan dan harapan masyarakat, dan diperkuat oleh adanya program kampung KB.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa program Kampung KB adalah program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan bersatunya masyarakat

dan pemerintah dalam mendukung program ini maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pembentukan Kampung KB dilakukan secara serentak di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam pembentukannya pihak BKKBN terlebih dahulu melakukan pendataan di berbagai lokasi. Termasuk Kota Jambi menjadi salah satu target pencaangan Kampung KB tersebut.

Kota Jambi merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Jambi, sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk Provinsi Jambi. Dimana di Kota Jambi terdapat 12 kecamatan.

Berikut beberapa tempat yang membentuk Kampung KB di Kota Jambi:

No	Nama	Kecamatan	Tanggal Pembentukan
1	Kencana Biru	Telanai Pura	25 Februari 2016
2	Kampung KB Mawar	Jambi Selatan	03 Agustus 2017
3	Batang Hari II	Jambi Timur	01 Agustus 2017
4	Bulken	Telanaipura	24 Agustus 2017
5	Keluarga Berkwalitas	Paal Merah	08 Agustus 2017
6	Purwosari	Kota Baru	07 Agustus 2017
7	Bina Kencana	Jelutung	08 Agustus 2017

8	Primadona	Pelayangan	07 Agustus 2017
9	Beringin Garuda	Pasar Jambi	10 Agustus 2017
10	Sipin Sejahtera	Danau Sipin	02 Agustus 2017
11	Maju Bersama	Alam Barajo	24 Agustus 2017
12	Alang Sunan	Danau Teluk	07 Agustus 2017

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdapat 12 kecamatan yang terpilih menjadi lokasi Kampung KB di Kota Jambi. Salah satunya adalah Kampung KB Maju Bersama di Kecamatan Alam Barajo Kelurahan Kenali Besar. Kampung KB Maju Bersama di Kecamatan Alam Barajo Kelurahan Kenali Besar dibentuk pada 24 Agustus 2017¹.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis bahwasanya program kampung KB di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo masih belum dilakukan secara optimal, seperti halnya terdapat rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya program KB sehingga angka kelahiran semakin tinggi dan tak terkendali, apatisnya sikap masyarakat terhadap program upaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat ini perlu di tindak lanjuti mengingat pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada tahun 2017 pencapaian peserta KB aktif di kelurahan Kenali Besar sangat rendah, lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan lain. Jika hal ini terus dibiarkan

¹ BKKBN, <http://kampungkb.bkkbn.go.id/list> diakses 05 September 2019

maka tingkat kelahiran akan semakin tinggi dan tak terkendali. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian skripsi yakni ***“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”***

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo?
2. Apakah Program Kampung KB sudah efektif dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program Kampung Keluarga Berencana dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui ke-efektifan Program Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

1.3. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat yang dilakukan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.

2. Manfaat Akademik

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu bagi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dalam rangka memperkaya *literature* bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa. Dan diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian-penelitian di bidang yang sama dimasa yang akan datang.

3. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai pembangun pemikiran serta informasi bagi Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi Jambi Khususnya di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Teori Implementasi

Menurut Kamus Besar Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, program atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu Program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²

Ada beberapa model implemnetasi kebijakan yaitu model implementasi Van Metter dan Van Horn, model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dan model Implementasi George C. Edward III. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Implementasi George C. Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edawar III dalam Agustino terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:³

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan

² BkkbN. *Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja*. Jakarta. Direktorat Bina Lini Lapangan, 2016.

³ Nosa ,B.A & Sri,W. *Jurnal Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*.Jawa Timur. 2017, hlm. 43.

informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indicator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap payung hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus

dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai implementasi kebijakan, maka dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang menyatakan terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, karena program Kampung KB bersifat Top-Down, artinya program tersebut dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan

kependudukan, untuk menuruni angka kelahiran tinggi, serta dapat mengendalikan angka kemiskinan sehingga masyarakat dapat kesejahteraan yang layak.⁴

Di mana variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Edward III merupakan variabel yang menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong Implementasi kebijakan mempunyai beberapa kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal), yaitu:⁵

- a. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan sistem dan prosedur yang harus digunakan.
- b. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

1.5.2. Teori Program Kampung Keluarga Berencana

1. Konsep Kampung KB

Menurut BKKBN dalam buku Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB, program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan program

⁴ *Ibid.*

⁵ Uppun, Paulus. Dampak Pelaksanan Kebijakan Otonimu Daerah Terhadap Pelayanan KB dan Pengendalian Kelahiran di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Piramida*. Vol. XII No. 2. ISSN : 1907-3275, 2016, hlm. 65.

Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT). Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pambangunan keluarga dan pambangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pambangunan khususnya pada daerah pinggiran. Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2. Tujuan Kampung KB

Menurut BKKBN terdapat dua tujuan pada program Kampung KB yaitu:

a. Tujuan umum:

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pambangunan keluarga serta pambangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan khusus:

1. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan Ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UPPKS);
6. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat;
7. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
9. Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat;
10. Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah;
11. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat;

3. Prasyarat Pembentukan Kampung KB

Menurut BKKBN proses pembentukan suatu wilayah akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan

digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

4. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Menurut BKKBN dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

- a. Kriteria Utama
 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu:

1. Kumuh;
2. Pesisir atau Nelayan;
3. Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Bantaran Kereta Api;
5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
6. Terpencil;
7. Perbatasan;
8. Kawasan Industri;
9. Kawasan Wisata;
10. Padat Penduduk;

c. Kriteria Khusus

1. Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.
2. Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

1.5.3. Teori Kesejahteraan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur,serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan

hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. .

Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor - faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor - faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: ⁶

⁶ Suandi, Yuslidar, Sudirman Suma, dan Yusma Damayanti. 2014. Hubungan Karakteristik Kependudukan Dengan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jambi. *Jurnal Piramida*. Vol. X No. 2 : 71 — 77. ISSN : 1907-3275.

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

1.5.4. Definisi Konsepsional

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan

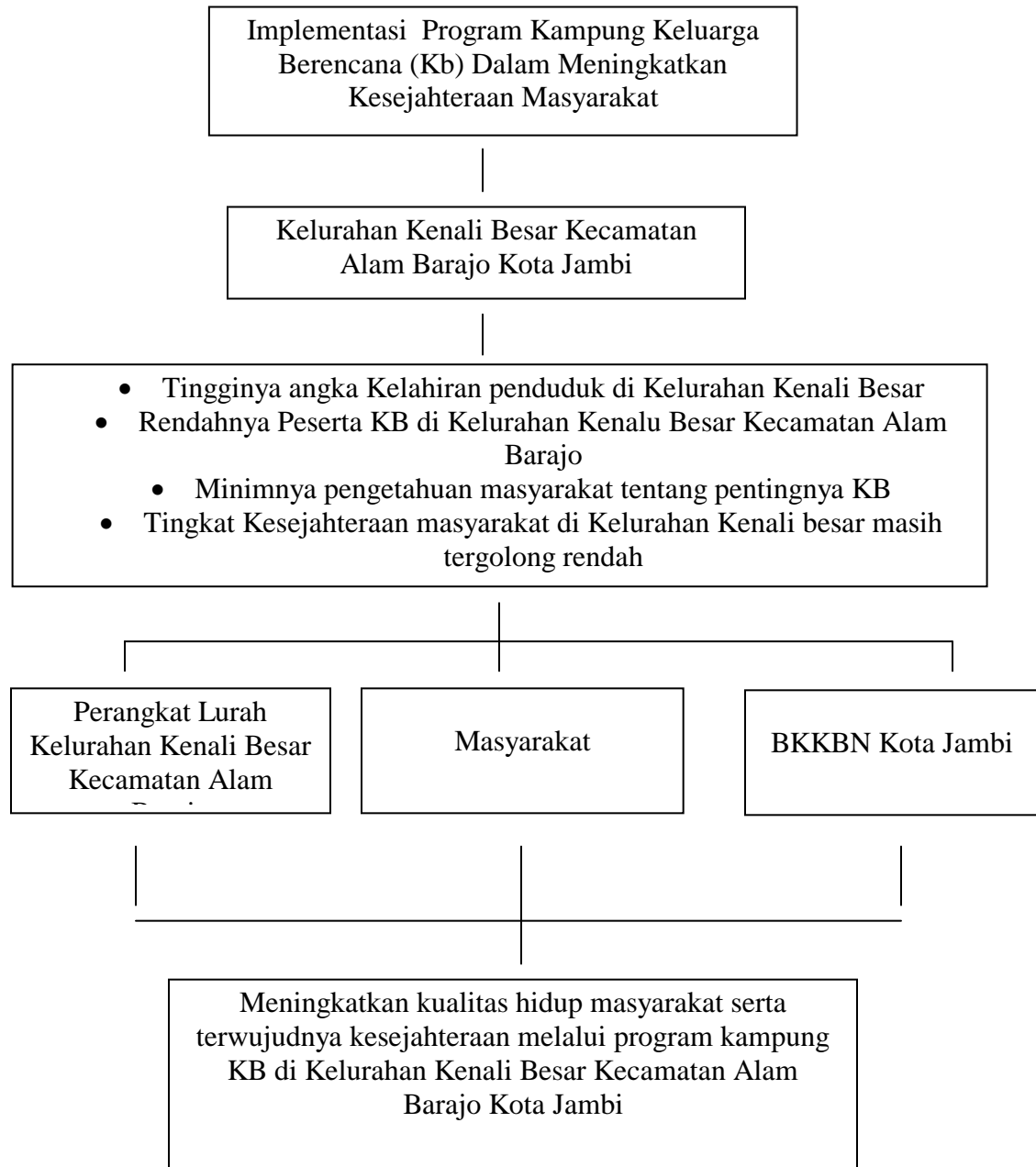
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁷

Menurut BKKBN dalam buku Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB tahun 2016, program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan program Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

⁷ Mardiyono, *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK*. Jawa Timur, 2017, hlm. 42.

1.5. Kerangka Fikir



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu.

“Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak”.⁸

Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga fakta yang ditemukan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan di gambarkan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, imam gunawan berpendapat bahwa :

“Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama”.⁹

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Tempat ini akan dijadikan tempat penelitian karena lokasi tersebut merupakan tempat penelitian berdasarkan permasalahan skripsi yaitu Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga akan berkompeten dalam melakukan penelitian permasalahan dan melihat realita yang berkaitan seputar penelitian.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015. hlm. 9.

⁹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta. Bumi Aksara. 2015, hlm. 80.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah berdasarkan pada pertimbangan efektivitas, efisiensi, baik waktu maupun dana yang tersedia.

1.6.3. Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.
- b. Efektivitas Program Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

1.6.4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber pertama di mana semua data dihasilkan¹⁰ Berupa data yang diperoleh langsung dari pengamatan (*observasi*) dan wawancara yang dikumpulkan melalui data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan terhadap objek penelitian yang berupa daftar pertanyaan yang meliputi Program Kampung KB sudah efektif dilakukan dalam pelaksanaan meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

- b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.¹¹ Data sekunder adalah data yang

¹⁰ M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Kencana.2013. hlm. 129

¹¹*Ibid*, hlm. 129

diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini berupa buku-buku ilmiah, laporan-laporan atau buku pedoman yang ada di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo serta dokumen-dokumen terkait implementasi dari Program Kampung KB maupun dari Internet sebagai penunjang data yang telah ada.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data yang dapat menunjang dalam proses pembuatan penelitian ini seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Pemerintahan dan Kamus Sosial.

1.6.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif menentukan informan kunci dan informan tambahan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, dimana teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *Snowball Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”¹² Dimana orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap dan memuaskan. Teknik ini dikenal dengan *Snowbal Sampling* adalah “teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar”.¹³

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan yang terdiri dari;

- 1) Informan Kunci (Key Informan) berjumlah 3 Orang yaitu;

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm.85.

¹³ *Ibid.*

1. Lurah Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
2. Sekretaris Lurah Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

2) Informan tambahan,

Informan Tambahan yaitu seseorang yang mengetahui dan memiliki bagian informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Maka yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah.

- a) Perangkat Lurah Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- b) Masyarakat Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama agar mendapatkan data.¹⁴ Prinsip dari pengumpulan data kualitatif adalah menggunakan multisumber bukti, menggunakan informan dan memperhatikan sumber lain serta menciptakan atas dasar studi kasus, mengorganisir dan mengoordinasikan data yang telah terkumpul. Data kualitatif ialah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (interview) dan observasi (pengamatan) serta studi perpustakaan (Dokumentasi).

1) Metode observasi

Metode Observasi yakni (pengamatan) dilakukan dengan mengamati dan mencatat sistematis tentang gejala yang diteliti. Ciri dalam observasi diantaranya mengabdikan dalam tujuan penelitian, mempunyai arah khusus. Sistematis dan hasil dapat diperiksa serta di

¹⁴ Sugiyono.*op.cit.*hlm46

buktikan. Selain itu observasi memiliki berbagai jenis observasi salah satunya adalah observasi partisipan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan dimana penulis langsung berbaur dengan objek yang diteliti, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan keaslian dan dapat dipertanggung jawabkan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang mengarah pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁶ Tipe wawancara dalam tataran luas terbagi menjadi, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁷ Wawancara memiliki tujuan menggali informasi lebih mendalam terhadap narasumber secara langsung. Jenis jenis wawancara antara lain : menurut prosedurnya, sasaran penjawab (Narasumber),

- a. Menurut Prosedurnya terbagi atas wawancara bebas (wawancara tidak terpimpin), wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin.
- b. Menurut sasaran penjawabannya (Kuantitas Narasumber) terbagi atas wawancara perorangan dan wawancara kelompok.

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dan berbentuk dalam gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan studi pelengkap dalam penggunaan metode wawancara dan observasi. Dokumentasi diklarifikasikan menjadi dokumen pribadi (tidak resmi) dan dokumen resmi. Dokumen Pribadi (tidak resmi) merupakan catatan seseorang secara tertulis tentang pengalaman, tindakan, kepercayaan, buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, hlm 78.

¹⁶ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*.(Jakarta:Bumi Akara, 2015).hlm 55

¹⁷*Ibid*, hlm.162

terbagi menjadi *intern* (memo, keputusan pimpinan, aturan lembaga tertentu dan lain — lain) dan *ekstern* (majalah, bulletin dan berita yang disiarkan oleh media, baik berupa media cetak maupun elektronik) .¹⁸

1.6.7. Teknik Analisis Data

Dari data yang sudah dikumpulkan penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teknik non-statistik. Analisa data adalah suatu proses mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Sejalan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan analisis dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

Tahapan dalam analisis data dimulai dari wawancara, dan pemahaman dari catatan lapangan ataupun objek dan sumber pendukung lainnya. Menurut McDrury seperti yang dikutip Moleong tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan model yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.

¹⁸ Imam Gunawan.*loc.cit*, hlm. 178

¹⁹ Moleong, lexy J. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. OSEF, 2007,hlm. 240.

²⁰ *Ibid*, hlm 248

Setelah melalui tahapan tersebut maka akan terbentuklah abstraksi, sehingga dapat memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial.

1.6.8. Triangulasi

Merupakan salah satu cara pengujian kredibilitas data yaitu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan waktu.²¹

Menurut Sugiyono dalam bukunya dijelaskan bahwa “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Sedangkan menurut Mantja yang, menjelaskan bahwa : “triangulasi dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan.”²²

Triangulasi menurut Sugiyono dibagi menjadi tiga yaitu “triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu”. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini sumber datanya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Jambi yang telah dipilih. Selanjutnya, triangulasi waktu, artinya dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi dan siang hari. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui triangulasi teknik, sumber, dan waktu tersebut, maka dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak. apabila narasumber memberikan data yang sama, maka data tersebut dapat dikatakan kredibel/sah/benar.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013. hlm. 73

²² *Ibid.* hlm. 74.